

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa telah berperan secara aktif dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 6b KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Peran jaksa dalam penyidikan memiliki urgensi tersendiri karena mampu mengintegrasikan proses penyidikan dan penuntutan dalam satu kesatuan, sehingga mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan kualitas dakwaan. Selain itu, jaksa penyidik memiliki pemahaman substansial terhadap aspek hukum yang dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan berkas perkara. Dalam praktiknya, jaksa juga telah menjalin kerja sama dengan lembaga lain seperti KPK dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi sudah berjalan dan memiliki kontribusi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Meskipun peran jaksa sebagai penyidik sangat strategis, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan KPK, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam koordinasi penyidikan. Selain itu, jaksa juga menghadapi tekanan

politik, kesulitan pengumpulan bukti terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi, hambatan birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian investigatif, serta kurangnya fasilitas teknologi forensik. Tantangan-tantangan ini memengaruhi efektivitas dan independensi jaksa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan regulasi yang jelas, penyediaan teknologi pendukung, serta penguatan sinergi antar-lembaga penegak hukum guna memaksimalkan peran jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Jaksa dapat melaksanakan peran penyidik secara lebih efektif, diperlukan pelatihan berkelanjutan dalam hal penyidikan, penggunaan teknologi forensik, dan pengelolaan bukti. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dan kelengkapan bukti yang mendukung dakwaan dalam kasus korupsi.
2. Diperlukan penguatan koordinasi antara jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menghindari konflik kewenangan. Ini bisa dilakukan melalui forum komunikasi atau platform bersama yang mempermudah pertukaran informasi dan memperlancar proses penyidikan tindak pidana korupsi.